

Pembinaan Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Melalui Perpustakaan Desa

Musmulyadi¹, M. Azizzullah Ilyas², Ifansyah Putra³
^{1,2,3} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

musmulyadi@uinfatmawati.ac.id, azizzullah@uinfatmawati.ac.id, ifansyah@uinfatmawati.ac.id

Submitted: 2024-07-31 | Revised: 2024-07-31 | Accepted: 2024-08-01

Abstract. Religious moderation is one of the flagship programs of the Ministry of Religion in educating the public about radicalism, but it became a problem when interviews were conducted among the community that understanding of this matter was still very minimal. This research aims to develop a model for fostering religious moderation by utilizing village libraries which are owned by almost every village in Indonesia. The research results show that the use of libraries as a forum for fostering religious moderation has great potential, a model that can be developed by utilizing libraries by adding religious moderation services as one of the library's additional services. The results of the trial of fostering religious moderation through village libraries showed a significant influence on increasing understanding and implementation of religious moderation by residents.

Keywords: Religious Moderation, Community Development, Village Library

Abstrak. Moderasi beragama menjadi salah satu program unggulan kementerian agama dalam mengedukasi masyarakat dari paham radikal, namun menjadi persoalan saat dilakukan wawancara dimasyarakat pemahaman mengenai hal ini masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembinaan moderasi beragama dengan memanfaatkan perpustakaan desa yang hampir dimiliki oleh setiap desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai wadah pembinaan moderasi beragama sangat potensial, model yang dapat dikembangkan dengan mendayagunakan perpustakaan dengan menambahkan layanan moderasi beragama menjadi salah satu layanan tambahan perpustakaan. Hasil uji coba pembinaan moderasi beragama melalui perpustakaan desa menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan penerapan moderasi beragama oleh warga.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pembinaan Masyarakat, Perpustakaan Desa

Pendahuluan

Riset menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau generasi Z.¹ dan 50% paham radikal-terorisme disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial di masyarakat baik kota maupun desa, karena tidak meratanya pembangunan, juga

¹ PPIM UIN Jakarta, 2017

akibat pemahaman agama yang sempit dimasyarakat sehingga dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan terorisme.² masyarakat Indonesia sangat multikultural. Majemuk, dan kompleks. Indonesia dengan wilayahnya yang luas terdiri dari berbagai etnis, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat serta keyakinan. Kondisi ini dapat memberikan efek positif sebagai bentuk kekayaan bangsa. Selain itu benih konflik dan disintegrasi juga dapat menjadi persoalan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Pada sisi lain Provinsi Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang bukan merupakan jalur yang ramai dikunjungi faktanya pernah digunakan sebagai tempat merencanakan, dan tempat menyimpan bahan-bahan peledak yang digunakan untuk meledakkan Hotel Marriott, bahkan pernah menjadi tempat persembunyian teroris (Dr. Azhari). Merujuk apa yang disampaikan oleh Rohimin bahwa Ada tiga istilah terorisme, yakni basis, transit, dan semai, yang semuanya bisa berjalan dengan baik di Bengkulu. Bengkulu ini tempat yang 'nyaman' bagi pelaku terorisme. Di sini tempatnya pembasisan, transit, dan menyemai kader teroris, tetapi beraksi di tempat lain. Meningkatnya individualisme, keterasingan (eksklusi) dan akses media tanpa batas serta lemahnya kontrol negara dapat menjadi penyebab munculnya perilaku intoleran.³

Salah satu desa yang merupakan target wisata di Provinsi Bengkulu adalah Desa Karang Jaya, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Desa ini berada di lereng bukit Kaba yang bersuhu dingin. Selain danau Mas Harun Bastari, perkebunan bunga milik warga, kebun jeruk dan stroberi, home stay, vila dan hotel menjadi daya tarik wisatawan baik lokal ataupun nasional untuk mengunjungi desa Karang Jaya. Berada dijalur perlintasan juga menjadi faktor yang menyebabkan Karang Jaya mudah untuk dijangkau.

Selain itu, Desa berseri dan Kampung KB merupakan salah satu program yang saat ini dijalankan di desa Karang Jaya. Penetapan sebagai Kampung Berseri pada 13 Agustus 2020 atas dasar terpenuhinya kriteria yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai kampung berseri.⁴ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) juga menjadikan Karang Jaya sebagai replika pengelolaan perpustakaan desa yang diproyeksikan ke arah TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial). Perpustakaan desa Karang Jaya bernama

² Azizah, Siti, dkk. *Inisiasi Pembentukan Desatoleransi sebagai Wujud Pencegahan Paham* Anang Fitrianto. 2017. *Menjadikan Pembelajaran Berbasis Perpustakaan: Sebuah Pengantar*. BPAD DIY

³ Baidhowi. *Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme*. Prosiding Seminar Nasional *Radikal Terorisme* (Jurnal Sumbangsih Vol.1 No. 8 2020)

⁴<https://rakyatbengkulu.com/2020/08/13/desa-karang-jaya-jadi-kampung-berseri/>

“Pustaka Jaya”, mulai beroperasi pada tahun 2020. Perbedaan TPBIS desa Karang Jaya dari desa lain adalah pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa dilaksanakan secara mandiri dengan biaya bersumber dari Anggaran Desa tahun 2021. Untuk lebih bermanfaat disaat pandemi Pustaka Jaya akan dikembangkan lebih jauh menjadi TPBIS digital. Selain itu, terdapat keinginan dari warga untuk mengembangkan aspek keagamaan di TPBIS sebagai pengembangan dari desa agro-wisata menjadi desa agro-wisata-beragama.⁵

Karang Jaya merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Analisa topografi, membagi desa Karang Jaya menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan DAS. Lahan yang ada dipergunakan untuk berbagai hal seperti untuk fasilitas bersama, perumahan warga, pertanian, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya yang secara keseluruhannya seluas 650 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 2980 Jiwa dan dengan 691 Kepala Keluarga Kepala keluarga. Jumlah yang besar ini seperti pisau bermata ganda, disatu sisi dapat menjadi modal dasar pembangunan sedangkan disisi lain dapat menjadi beban pembangunan.

Data aspek agama, dari 691 Kepala Keluarga di Karang Jaya terdapat 40 Kepala Keluarga yang menganut agama kristen, sisanya merupakan penganut agama Islam. Untuk rumah ibadah terdapat satu Masjid, satu gereja dan dua Musholla. Satu pemakaman umum yang digunakan bersama untuk umat Islam dan Kristen. Jika ditinjau dari usia penduduk, desa Karang Jaya termasuk desa yang mayoritas penduduknya berdapa pada usia produktif. Disimpulkan dari jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur 17 s/d 65 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya 2392 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 05 – 16 tahun berjumlah 455 jiwa dan 0 s/d 5 Tahun yaitu 113 jiwa, sedangkan kelompok umur lansia 65 th keatas berjumlah 30 jiwa. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Struktur penduduk desa Karang Jaya sangat majemuk, baik dari keragaman golongan, agama maupun suku, dimana mayoritas penduduk berasal dari suku Jawa, Rejang dan Lembak. Untuk agama didominasi oleh Islam dan Kristen. Kemajemukan penduduk terlihat pada keragaman suku, agama dan golongan, hal ini menuntut masyarakat desa untuk dapat menghargai perbedaan dan bertoleransi, serta mampu menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan.

⁵ M. Rafiuddin, Kepala Desa Karang Jaya, Wawancara 19 April 2021



Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Salah satu keunggulan dari Desa Karang Jaya adalah ketersediaan sarana pendidikan baik umum ataupun agama yang cukup, data ketersediaan sarana pendidikan:

1. PAUD Tunis
2. TK Yayasan Nurul Kamal
3. SD Negeri 136
4. MI Nurul Kamal
5. SMP Islam Terpadu
6. Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Nurul Kamal
7. Madrasah Diniyah Yayasan Nurul Kamal
8. Taman Pengajian Alquran Mushollah

Namun terdapat juga permasalahan yang dihadapi seperti kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta masih belum terpenuhinya sarana penunjang pendidikan. Selain itu, sebagai salah satu desa yang merupakan destinasi wisata dan daerah perlintasan yang kerap dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar provinsi mengharuskan penduduk desa lebih inklusif, toleran dan moderat.

Pustaka Jaya juga berbenah untuk dapat menggandeng pihak luar dalam menyediakan model pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam segala aspek baik secara daring ataupun secara luring. Hal ini menjadi salah satu sarana yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pendidikan dan pembinaan masyarakat pada berbagai bidang. Faktor lain yang menjadi daya tarik tersendiri bahwa desa Karang Jaya merupakan desa yang memiliki beberapa aset wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal dari daerah sekitar dan dari provinsi tetangga Sumatera Selatan. Selain itu akses jalan yang baik dan dilewati jalan provinsi menjadikan Karang Jaya berkembang secara

ekonomi. Keinginan untuk menjadikan desa beragama atau religi selain sebagai desa Agro-Wisata yang memang telah dicanangkan sejak lama merupakan salah satu program kedepan.

Pembinaan berbasis perpustakaan merupakan model pengembangan perpustakaan yang menunjang pendidikan dan pembinaan untuk masyarakat lintas usia sepanjang hayat.⁶ Perpustakaan tidak saja berperan menyediakan informasi yang dibutuhkan melainkan perpustakaan menjadi wadah yang berperan untuk mengaktualisasikan, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dan komunitas tertentu. Mengingat keadaan masyarakat yang berbeda-beda dengan tingkat pendidikan yang berbeda, status sosial, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, yang dapat menjadikan suatu elemen di masyarakat terekskusi dan terpinggirkan.⁷

Perilaku intoleran yang terjadi dapat dipicu oleh faktor penyebab struktural dan atau faktor penyebab fasilitator. Meningkatnya individualisme, keterasingan (eksklusi) dan akses media tanpa batas serta lemahnya kontrol negara dapat menjadi penyebab munculnya perilaku intoleran meskipun hal tersebut bukan pendorong utama.⁸ Sekitar 50% penyebab munculnya paham radikal disebabkan karena faktor kesenjangan sosial di masyarakat baik kota maupun desa karena tidak meratanya pembangunan. Selain itu radikalisme juga diakibatkan oleh pemahaman agama yang sempit sehingga dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme.⁹

Maka perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk menjadi wadah pembinaan, pendidikan dan penyuluhan yang ramah bagi semua, terbuka, bersahabat, dan menyenangkan. Selain itu perpustakaan sendiri dapat dijadikan sebagai rumah mini dari penerapan moderasi beragama. Dimana saat pembinaan moderasi beragama dilaksanakan peserta diseleksi dengan mencampurkan mereka yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik agama, suku ataupun faktor heterogenitas lainnya. Disamping itu perpustakaan pada perannya di masyarakat dapat menjadi sarana pendidikan, pembinaan, dan

⁶ Undang-undang No.43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, hal. 261

⁷ Noor, Usman. *Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet Untuk Menumbuhkan Inklusi Sosial di Perpustakaan Daerah* (JIPI Vol. 4. No.1 2019), hal. 85

⁸ Baidhowi. *Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme*. Prosiding Seminar Nasional Unnes, Semarang: 2017. Hal, 208

⁹ Azizah, Siti, dkk. *Inisiasi Pembentukan Desatoleransi sebagai Wujud Pencegahan Paham Radikal Terorisme* (Jurnal Sumbangsih Vol.1 No. 8 2020) hal. 51

penyuluhan sepanjang hayat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan lintas usia.

Penelitian ini diharapkan dapat menyiapkan desa perpustakaan desa yang menjadi model pembinaan untuk menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama melalui pemanfaatan pendidikan berbasis perpustakaan. Digitalisasi perpustakaan merupakan pengembangannya perpustakaan, dimana perpustakaan berfungsi sebagai tempat akses internet publik gratis, menyediakan kelas literasi digital dan inklusi digital, menyediakan layanan *e-government*, melayani peran tanggap darurat, dan semakin terlibat dalam penyediaan layanan sosial dan pendidikan.¹⁰ Karang Jaya sendiri selanjutnya dengan memanfaatkan perpustakaan desa diharapkan dapat menularkan nilai-nilai positif moderasi beragama selain ke warga desa dan wisatawan juga ke desa-desa lain baik secara luring ataupun daring.

Topik moderasi beragama merupakan salah satu tema sub riset dan tema capaian Arkan 2018-2028. Kajian moderasi beragama sendiri banyak dilakukan oleh para peneliti dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu penelitian moderasi dilakukan oleh Elma Haryani, Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia. Penelitian ini menyarankan agar para orang tua lebih memperhatikan aktivitas anak saat mengakses gawai atau perangkat informasi dalam mewaspadaikan dengan mengembangkan nilai-nilai agama yang moderat dalam keluarga. Kajian tentang moderasi beragama juga dilakukan oleh Ahmadi yang melihat moderasi beragama dalam keragaman di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi tidak bisa terjadi dengan sendirinya, diperlukan peran banyak pihak untuk mewujudkan moderasi beragama termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan penyuluh agama.

Penelitian lain dilakukan oleh Rabiah, Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat. Penelitian ini berangkat dari kualitas toleransi pada beberapa kota di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman siswa mengenai moderasi dalam beragama, toleransi antar umat beragama di sekolah dan peran pendidikan agama.

Penelitian lain mengenai moderasi beragama dilakukan oleh Afwadzi, ia menyatakan dalam penelitiannya yang mencoba mengupas bagaimana membangun moderasi beragama dengan parenting washatiyah dan

¹⁰ Stilwell, Cristine. *Public Libraries and Social Inclusion: An Update from South Africa In Perspectives on Libraries as Institutions of Human Rights and Social Justice*. Published online: 26 Feb 2016; 119-146

perpustakaan Qur'an, bahwa untuk membangun literasi moderasi beragama diperlukan waktu yang lebih lama, waktu tiga bulan cukup untuk membangun pemahaman beragama peserta Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) menjadi lebih moderat. Selain itu ditemukan fakta bahwa moderasi beragama juga membantu menumbuhkan kecintaan kepada negara dan menolak paham-paham radikal.

Penelitian lain yang menganalisa moderasi beragama dilakukan oleh Rahmad Hidayat tentang multikultural dalam bingkai moderasi beragama di desa Sindang Jati, mengungkapkan bahwa untuk membangun nilai-nilai moderasi bersama diperlukan adanya kesepakatan yang dimulai dari tokoh pemerintahan desa, tokoh agama dan warga untuk dapat melestarikan perbedaan dan kegarapan, dan bersama dengan itu tetap hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Konsensus bersama tersebut menjadi pijakan untuk keberlangsungan konsep multikultural yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pada kasus desa Sindang Jati sikap moderasi telah lama tertanam dikalangan warga dan menjadi tradisi, sehingga hal ini sangat menunjang untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Pemahaman tentang moderasi sejak lama tersebut sangat memadai untuk mendukung keharmonisan sosial, yang bermuara dalam kata kedewasaan dalam memahami perbedaan, yang akhirnya kesepakatan dalam bermoderasi dapat diformulasikan melalui dialog antar pemeluk agama, penguasaan dan pemahaman agama secara utuh dan pendidikan moderasi beragama sejak dini.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia dalam menghadapi realita kompleksitas dan keragaman pada dasarnya memiliki modal sosial yang kuat. Konflik yang terjadi di masyarakat tidak selalu mencerminkan hilangnya nilai-nilai toleransi dan munculnya konservatisme dalam beragama. Konflik tersebut sering terjadi diakibatkan oleh komunikasi yang tidak lancar dan salah paham di masyarakat. Menghadapi perbedaan Agama sejak lama Kementerian Agama mewacanakan Trilogi Kerukunan yakni: kerukunan intern agama, antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan ini disuarakan oleh Menteri Agama di era Presiden Suharto, Alamsjah Ratu Perwiranegara yang kemudian dimaksudkan untuk menciptakan sikap toleransi antar umat beragama, saling menghormati antar dan intraumat beragama, saling menghargai dan gotong royong, sehingga terbina kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD '45.¹¹

Moderasi berasal dari bahasa Arab al-wasathiyah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Akar kata *wasath* bermakna pertengahan, berimbang dan baik. Moderat adalah mengutamakan sikap tasamuh (toleransi) dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut tidak menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kerjasama menjadi hilang.¹²

Moderat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti selalu menghindari pengungkapan (pembicaraan) yang esktrim, selalu menghindari sikap atau tindakan yang ekstrem, kecenderungan ke arah jalan tengah.¹³ Sedangkan pendapat lain menyatakan kata wasathan mempunyai dua arti, yaitu adil dan tengah-tengah. Kedua kata tersebut berbeda tapi mempunyai maksud yang sama yaitu adil. Sumber lain menjelaskan bahwa moderat atau *wasathiyah* adalah cara berIslam dengan kedewasaan. Selain sebagai Islam jalan tengah, tidak ekstrem kiri maupun kanan, makan Islam *Wasathiyah* juga bermakna sikap keagamaan yang dewasa.¹⁴ Islam Wasathiyah juga tergambar dari kedewasaan menerima kemajuan

Wasathiyah (moderasi beragama) selanjutnya dapat diimplementasikan dalam cara bersikap, memandang, dan selalu mengambil posisi ditengah-tengah, dengan selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam memahami dan mengamalkan agama.¹⁵ Sikap *wasathiyah* (moderasi) merupakan sikap menjauhkan diri dari dua sisi ekstrim, serta berupaya mencari titik temu antara keduanya. Sikap *tawazun* (seimbang) bermakna tidak mementingkan diri sendiri secara absolut, dan tidak juga mementingkan orang lain secara absolut. Mengejar kesenangan dan keuntungan pribadi di satu sisi, dan di sisi lain mengejar kesenangan dan keuntungan bersama. Sikap moderasi terlihat dari pengambilan jalan tengah secara seimbang.¹⁶

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta : Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019, hal. 54.

¹² Darlis. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol. 13 No.2 Desember 2017, 225-255.

¹³ Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Cet.I; Kashiko: Surabaya, 2006), h.466.

¹⁴ <https://mui.or.id/berita/31461/kiai-cholil-nafis-islam-wasathiyah-itu-berislam-dengan-kedewasaan/>.

¹⁵ Tim Penyusun Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balai Litbang Kementerian Agama RI., h. 17

¹⁶ Kamali, Mohammad Hasyim. *Moderation and Balance in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press. 2015., h.31

Diantara beberapa indikator moderasi beragama yang berkembang, bahwa individu atau masyarakat dapat dianggap moderat dalam beragama menurut departemen Agama jika memiliki:

- (1) Komitmen kebangsaan,
- (2) Toleransi,
- (3) Anti-kekerasan
- (4) Akomodatif terhadap budaya lokal

Keempat indikator ini dapat dikembangkan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan seorang atau dimiliki dan dipraktekkan oleh masyarakat di wilayah tertentu dalam konsep moderasi beragama versi Kementerian Agama. indikator moderasi tersebut dapat dimiliki oleh perorangan juga sangat mungkin dimiliki bersama oleh suatu komunitas dalam suatu masyarakat.

Selain sumber pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang seiring waktu, individu juga memerlukan sumber eksternal untuk mengaktualisasikan dirinya. Pembelajaran Berbasis Sumber merupakan model pendidikan yang didesain untuk melibatkan individu secara aktif dalam menggunakan berbagai sumber belajar, baik tercetak maupun non-cetak. Idealnya, pada pembinaan dan pembelajaran berbasis perpustakaan hendaknya ada semacam kolaborasi antara fasilitator dan pustakawan dalam proses perencanaan pembelajaran andragogi.¹⁷

Perpustakaan jangan hanya dipandang sebagai sebuah sarana fisik belaka, tetapi harus diperhatikan ruh perpustakaan yang sesungguhnya, yaitu sebagai bentuk layanan informasi dalam mendukung peningkatan pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi.¹⁸ Salah satu cara untuk mendorong budaya literasi mengenai moderasi beragama adalah melalui pengembangan perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga yang menyediakan sumber informasi terpilih untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran layanannya. Perpustakaan juga harus mampu memenuhi kebutuhan informasi penggunaannya.¹⁹

Perpustakaan sendiri memiliki beberapa tujuan; *pertama*, untuk memberikan informasi tepat, cepat dan murah untuk masyarakat. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat membaca sesuatu

¹⁷ California Media and Library Educators Association, 1994

¹⁸ Anang Fitrianto. 2017. *Mewujudkan Pembelajaran Berbasis Perpustakaan: Sebuah Pengantar*. BPAD DIY

¹⁹ Susilawati, S., Marlina, M., Ilmi, K., Gunawan, A. A. N., & Zulham, Z. (2024). The Urgency of Providing Village Library Services in Increasing Village Community Literacy and Creating Quality Human Capital. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(3), 238-244.

yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup. *Ketiga*, membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. *Keempat*, menjadi agen kultural maksudnya perpustakaan menjadi pusat kehidupan budaya masyarakat sekitarnya.²⁰ Perpustakaan umum terus didirikan di masyarakat, menyediakan akses terhadap buku dan terbitan berkala, seringkali dengan dukungan dana dari pemerintah kota.²¹

Perkembangan perpustakaan sebagai menjadi pusat informasi, sumber ilmu, pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta berbagai layanan jasa lainnya memiliki tiga kegiatan pokok yaitu; *pertama*, mengumpulkan (*to collect*) semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan, misi organisasi dan masyarakat yang dilayani. *Kedua*, melestarikan, memelihara dan merawat semua koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, tidak lekas rusak (*to preserve*). *Ketiga*, menyediakan informasi yang siap dipergunakan dan diberdayakan (*to make available*) oleh pembaca dari seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan.²²

Perpustakaan berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal, agen perubahan, dan agen pembangunan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk mencari informasi, mengembangkan ide kreatif dan inovasi, mencari ide dalam memecahkan masalah, dan mencari informasi tentang hal-hal baru.²³ Pembinaan Berbasis Perpustakaan (PBP) atau library-based learning (LBL) merupakan upaya meningkatkan kualitas pembinaan dengan menggabungkan antara kegiatan pembinaan dan perpustakaan sebagai sumber dan media pembelajaran. PBP merupakan bagian dari konsep library-based education atau (LBE). PBP diperlukan sebagai jawaban terhadap kebangkitan era informasi yang memproduksi informasi begitu banyak dan mudah diperoleh. Pada era seperti ini, informasi merupakan sebuah suplemen untuk mengembangkan model pendidikan yang lebih efektif.

Perpustakaan pedesaan dan pusat sumber daya masyarakat pedesaan harus memiliki infrastruktur yang dikembangkan dengan baik untuk kelancaran

²⁰ Dian sinaga. *Perpustakaan Umum di Indonesia Sebagai Agen Perubahan Sosial*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No. 1, Maret 2004

²¹ Lewis, Jasmyne R. Marshall University ProQuest Dissertations & Theses, 2024. 31140429.

²² Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* (Jakarta: Sagung Seto, 2006)., h. 1

²³ Heriyati, P., Kalumbang, Y. P., & Dewanti, R. (2021, April). Village library for sustainable community empowerment program case: Village library at Tirtomoyo Village Pakis, Malang District, East Java. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 729, No. 1, p. 012138). IOP Publishing.

arus informasi dan harus didorong untuk mengambil bagian dalam program perpustakaan pedesaan terpadu.²⁴ Sinergi antara pembelajaran dan perpustakaan sebagai sumber dan media pembelajaran adalah sesuatu hal yang merupakan tuntutan perkembangan zaman, dan PBP merupakan salah satu upaya penciptaan sinergi yang dibutuhkan itu.

PBP sendiri merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam memaksimalkan kegiatan pembinaan baik di institusi pendidikan ataupun di masyarakat.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung oleh Dr. Mus Mulyadi dan tim moderasi beragama dari LPPM IAIN Bengkulu. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dengan menggunakan video visual untuk memberikan gambaran nyata dari bentuk-bentuk perilaku moderat dalam beragama. Sebelum kegiatan dilaksanakan pre-test untuk melihat sejauh mana pengetahuan peserta dan kesadaran peserta mengenai moderasi beragama. Setelah kegiatan untuk melihat hasil pembinaan yang dilakukan bagi peserta dilaksanakan post-test.



Gambar 1. Pembinaan Moderasi Beragama di Perpustakaan Desa

Pembinaan ini diikuti oleh 16 orang peserta dari warga desa yang berasal dari berbagai elemen, sebelum dilaksanakan pembinaan dilakukan pre-test dan setelahnya dilaksanakan post-test.

²⁴ Mahadevan, B., & Vadivel, K. Role OF District And Village Libraries IN The Socio–Cultural Educational Development Of Thanjavur.

No	Nama	Status di Desa
1	Novita Yanti	Ketua Ibu PKK Desa
2	Wanda Yunanto	Perangkat Desa
3	Marjoko	TOGA desa
4	Abi Kusno	BMA Desa
5	Viya Puspitasari	Risma Desa
6	Redi Pratama	Karang Taruna
7	Nita Oktaria	PAH Desa
8	Niken Renata	Perpusdes
9	Aria Dwijayanto	BPD Desa
10	M. Yusuf	TOMA Desa
11	Reka yulianti	Guru Desa
12	Herliyansyah	Guru Desa
13	Tarmizi	Warga Deas
14	Saepudin	Warga Desa
15	M. Furqon	Pengurus Perpustakaan Desa
16	Yusrizal	Pengurus Perpustakaan Desa

Penerapan PBP diharapkan mampu mengantarkan warga masyarakat memiliki alternatif sumber informasi yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan serta kemampuan untuk menemukan, mengolah dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat ataupun menjadi sumber pengembangan usaha dan pembinaan. Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, terdapat tiga unsur utama yang harus dipersiapkan.

Pertama, adanya pembinaan sadar informasi (*information literacy*) atau keterampilan memanfaatkan sumber yang tersedia diperpustakaan, keterampilan memilih dan memilah buku yang dicari, isi dan berguna. *Kedua*, adanya keterpaduan program antara pembinaan dan perpustakaan. *Ketiga*, adanya kerjasama antara perangkat desa dan pengelola perpustakaan desa serta narasumber belajar.

Perpustakaan, akhirnya akan berfungsi tidak saja sebagai sumber belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan bacaan, ruang inspirasi bagi temuan-temuan baru, sebagai mimbar akademik yang bebas dan sebagai lapangan penelitian. Modal awal yang dimiliki masyarakat desa Karang Jaya salah satunya ada kemajemukan warga yang terdiri dari berbagai suku dan agama serta dan kearifan yang turun-temurun mewariskan nilai-nilai keterbukaan tanpa disadari.

Unsur lain yang merupakan keunggulan Desa Karang Jaya merupakan ketersediaan perpustakaan desa yang secara sarana dan prasarana cukup untuk dijadikan modal untuk mengembangkan model pendidikan dan pembinaan moderasi beragama dengan memanfaatkan perpustakaan atau dikenal dengan istilah *library based learning*.

Dari kegiatan pembinaan tersebut didapatkan bahwa hasil pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukan perbandingan dari nilai yang diperoleh oleh peserta sebelum dilaksanakan pembinaan dan setelah. Berikut perbandingan nilai peserta berdasarkan tema.

No	Nama	Nilai Pretest				Nilai Postest			
		KK	T	AK	BL	KK	T	AK	BL
1	No***a Yanti	70	65	65	70	85	90	85	85
2	W***a Yun**to	65	65	50	55	80	80	60	60
3	Mar***o	45	75	80	75	80	80	90	80
4	Abi K***o	50	70	60	60	85	75	70	75
5	V*ya P***itasari	75	75	60	65	85	90	80	80
6	R*di Pr***ma	50	60	50	67	80	80	75	80
7	Nita Ok****ia	80	85	75	70	90	95	85	80
8	N**en R***ta	60	75	75	70	80	85	85	90
9	Aria Dw***yanto	75	60	60	70	85	85	90	85
10	M. Yu**f	60	65	60	55	85	90	90	80

Hasil postest menunjukkan kenaikan yang signifikan, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan moderasi beragama terhadap masyarakat berbasis perpustakaan sangat memberikan dampak bagi pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai pada aspek Komitmen Kebangsaan mengalami kenaikan sebanyak 0,24%, aspek toleransi naik sebanyak 0,18%, aspek anti kekerasan naik 0,21 dan akomodatif terhadap budaya lokal naik sebesar 0,17.

Dari data tersebut perpustakaan dapat menyediakan sarana, sebagai sumber informasi, dan pusat pembinaan dan pembelajaran. Lebih jauh Perpustakaan dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembinaan yang tersebar hampir di setiap desa. Perpustakaan desa disamping memiliki kewajiban moral untuk menyediakan akses informasi bagi semua orang yang dapat digunakan untuk pemberdayaan diri, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan bangsa. Perpustakaan umum melalui pembinaan berbasis perpustakaan (PBP) juga diharapkan dapat

membantu pemerintah khususnya dalam memberikan informasi mengenai moderasi beragama, dan program literasi informasi mengenai moderasi beragama yang dibutuhkan oleh masyarakat penggunanya.

Penutup

Perpustakaan memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan untuk pembinaan masyarakat secara luas. Namun potensi perpustakaan yang besar dan tersebar sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia terkesan diabaikan. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa Indonesia memiliki suatu wadah pendidikan dan pembinaan yang tersebar hampir ke seluruh pelosok desa yaitu perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya memiliki fungsi informatif, lebih jauh fungsi edukasi perpustakaan dapat didayagunakan dan dikembangkan secara massal sebagai wadah pembelajaran dan pembinaan beragam tema pendidikan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyentuh segala lapisan umur dan komponen di masyarakat.

Pembinaan dalam bidang moderasi beragama hanya sebagai salah satu contoh. Pengembangan model pembinaan moderasi beragama berbasis perpustakaan dapat menjadi tolak ukur bahwa beragam layanan dapat dibuka di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Pengembangan layanan moderasi beragama berbentuk pembinaan dengan memanfaatkan mini teater dan pojok moderasi beragama di perpustakaan desa dapat menjadi model pencegahan tindakan radikalisme yang mengedepankan inklusivitas pada level masyarakat akar rumput dengan metode yang sederhana.

Daftar Pustaka

- Azizah, Siti, dkk. *Inisiasi Pembentukan Desatoleransi sebagai Wujud Pencegahan Paham*
Anang Fitrianto. 2017. *Mewujudkan Pembelajaran Berbasis Perpustakaan: Sebuah Pengantar*. BPAD DIY
- Baidhowi. *Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme*. Prosiding Seminar Nasional *Radikal Terorisme* (Jurnal Sumbangsih Vol.1 No. 8 2020)
- Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Cet.I; Kashiko: Surabaya, 2006)
- Dian sinaga. *Perpustakaan Umum di Indonesia Sebagai Agen Perubahan Sosial*. Jurnal *Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2004
- Darlis. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol. 13 No.2 Desember 2017, 225-255.
- Heriyati, P., Kalumbang, Y. P., & Dewanti, R. (2021, April). Village library for sustainable community empowerment program case: Village library at Tirtomoyo Village Pakis, Malang District, East Java. In *IOP Conference*

- Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 729, No. 1, p. 012138). IOP Publishing.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Moderation and Balance in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press. 2015.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta : Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019
- Lewis, Jasmyne R. Marshall University ProQuest Dissertations & Theses, 2024. 31140429.
- Mahadevan, B., & Vadivel, K. Role of District and Village Libraries in the Socio-Cultural Educational Development of Thanjavur.
- Noor, Usman. *Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet Untuk Menumbuhkan Inklusi Sosial di Perpustakaan Daerah* (JIPI Vol. 4. No.1 2019)
- Stilwell, Cristine. *Public Libraries and Social Inclusion: An Update from South Africa In* Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* (Jakarta: Sagung Seto, 2006).
- Tim Penyusun Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balai Litbang Kementrian Agama RI.
- Perspectives on Libraries as Institutions of Human Rights and Social Justice*. Published online: 26 Feb 2016; 119-146
- Undang-undang No.43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, hal. 261